



**DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PERKEBUNAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**
NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**
TAHUN 2024

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan perencanaan dan Pembangunan penelitian dan pengembangan perlu disusun Rencana Kerja (renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow;

b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow tentang penunjukkan Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);

2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Republik Indonesia nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dengan susunan personalisasi Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasi serta menganalisis data rencana kerja tahun 2024;
- b. Membahas dan mencermati perencanaan Pembangunan penelitian dan pengembangan daerah
- c. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Renja.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Tim Pelaksana Penyusunan Renja 2024 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT

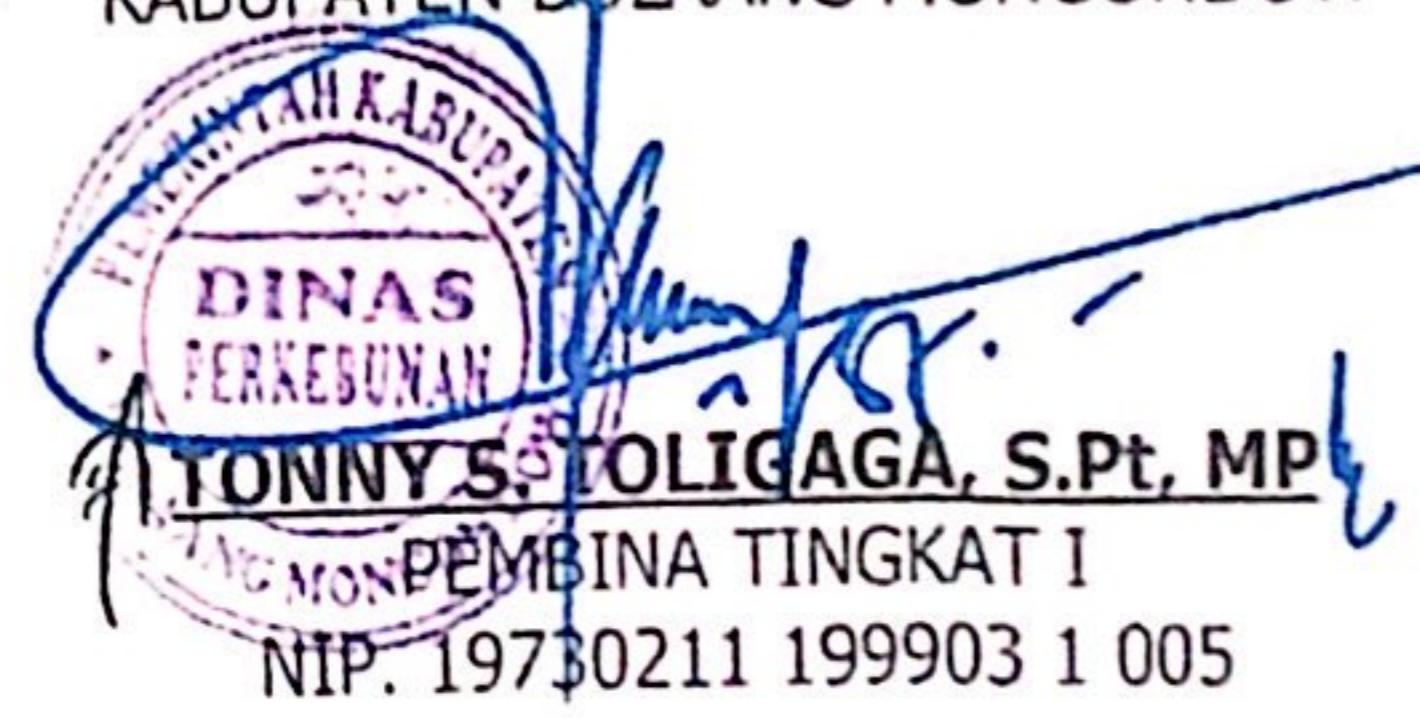
: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanakan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal : 03 Juni 2023

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 20 TAHUN 2023

TANGGAL : 03 JUNI 2023

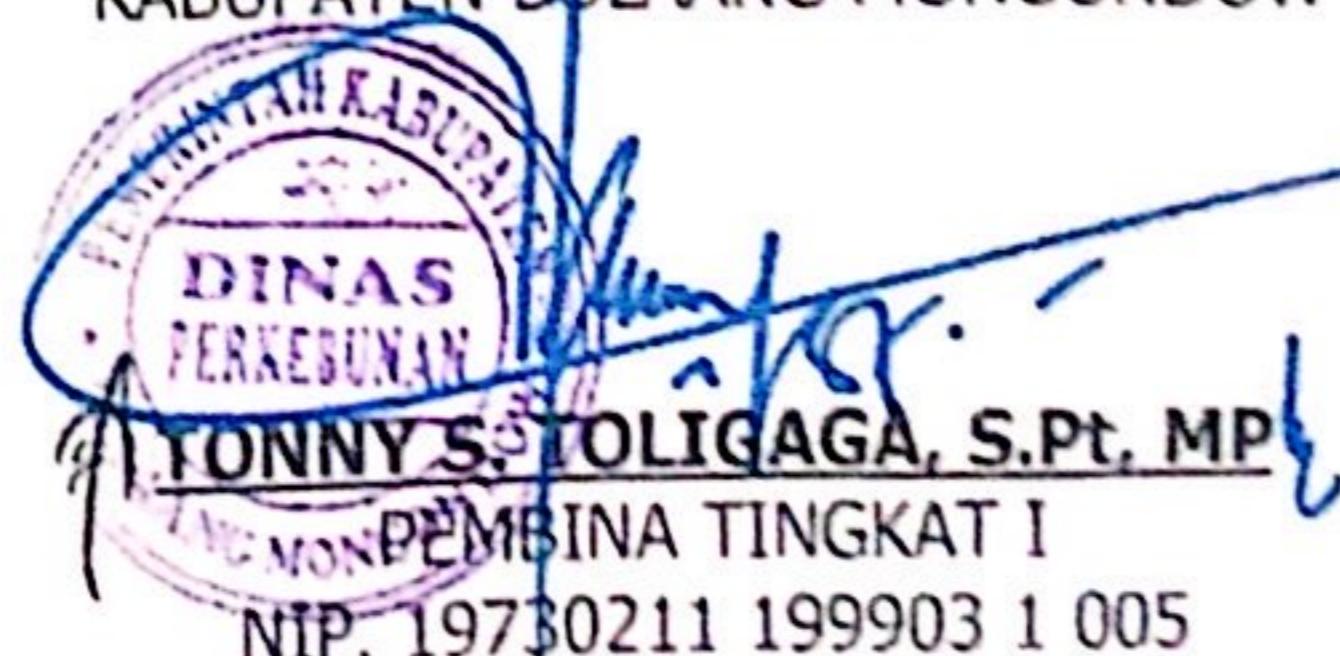
TENTANG

: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow
- II. Tim Penyusun
- | | |
|------------|---|
| Ketua | : Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow |
| Sekretaris | : Kasubag, Program, Keuangan dan Pelaporan |
| Anggota | :
1. Kepala Bidang Produksi Tanaman Perkebunan
2. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Bina Usaha Perkebunan
3. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
4. Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
5. Naftali Medi Beka, SE
6. Herdi Podomi
7. Norma Gonibala, SP |

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjangkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Ridho-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Tahun 2024 sehubungan dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan sektor perkebunan di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Tahun 2024 merupakan rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow yang disusun berdasarkan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 - 2026

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini bertujuan untuk menentukan dan merumuskan rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan Evaluasi pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2022. Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Lolak, Juli 2023

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
DAFTAR TABEL -----	iii
BAB I. PENDAHULUAN -----	1
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Landasan Hukum -----	2
1.3 Maksud dan Tujuan -----	4
1.4 Sistematika Penulisan -----	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 -----	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD -----	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah -----	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah -----	19
2.4 Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD -----	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat -----	28
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH -----	29
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional -----	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah -----	31
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan -----	31
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH -----	37
BAB IV. PENUTUP -----	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2022 -----	7
Tabel 2.2	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan TA. 2022 -----	9
Tabel 2.3	T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan dan Pencapaian Renstra Dinas Perkebunan s/d Tahun 2022 -----	11
Tabel 2.4	T-30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan -----	16
Tabel 2.5	Produksi Perkebunan Tahun 2021 dan Tahun 2022 (tibu ton) -----	20
Tabel 2.6	Identifikasi Isu-isu Strategis -----	22
Tabel 2.7	T-C31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 -----	24
Tabel 2.8	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 -----	28
Tabel 3.1	Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 -----	29
Tabel 3.2	Tema Pembangunan dan Prioritas Daerah Tahun 2024 -----	30
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan Tahun 2023-2026 -----	31
Tabel 3.4	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 -----	30
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023 -----	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sektor perkebunan secara umum terbukti telah menjadi penggerak perekonomian wilayah. Namun dalam pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Bolaang Mongondow belum optimal. Berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangannya, antara lain permasalahan dari aspek teknis berupa: (1) luas tanam dan luas panen tanaman perkebunan yang menurun akibat bertambahnya tanaman tua dan rusak; (2) kondisi sarana dan prasarana belum memadai; (3) penerapan teknologi perkebunan masih rendah; (6) industri hilir perkebunan dan pemasarannya masih terbatas; dan (7) masih perlunya pendampingan dalam merubah sikap, perilaku dan keterampilan petani.

Permasalahan lainnya juga ditemukan antara lain keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber permodalan dan kapasitas sumberdaya manusia petani yang masih rendah.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, pembangunan perkebunan masih tetap penting untuk dilanjutkan secara berkesinambungan dalam rangka pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah: 1) potensi sumber daya yang besar dan beragam, 2) banyaknya penduduk yang bergantung pada sektor ini, 3) peluang pasar yang sangat terbuka, dan 4) berpotensi besar dalam memberikan kontribusi PDRB

Dokumen Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada RPD tahun 2023-2026 dan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra maka perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Dokumen Renja ini disusun dengan maksud untuk mengefektifkan dan mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2024 sehingga tujuan pembangunan perkebunan dan tujuan pelayanan publik dapat tercapai.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja organisasi Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perkebunan adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
12. Peraturan Bupati nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan ini dimaksudkan untuk :

- 1) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Renja Dinas Perkebunan.
- 2) Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun dalam urusan perkebunan, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow.

b. Tujuan

Renja Dinas Perkebunan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya dalam mencapai target-target yang telah ditentukan, agar lebih terarah, terukur dan bertanggung jawab.

1.4. Sistematika

Sistematika penyajian dokumen Renja Dinas Perkebunan ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja perangkat daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD,

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 (n-1) serta pencapaian tahun berjalan tahun 2023 (n) dan perkiraan capaian target tahun 2024 (n+1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional (seperti NSPK, SPM, dan SDGs);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkat pelayanan perangkat daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarananya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kabupaten.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Bagian ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Bagian ini mengemukakan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, Bagian ini berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, Bagian ini berisikan tentang program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB V PENUTUP, pada bagian ini dikeumukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya program dan kegiatan, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kaidah - kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Tercapainya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan untuk mengevaluasi kinerja sebuah entitas. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pada tahun 2022 Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow menerima anggaran sebesar Rp. 9.357.175.562,- dengan Realisasi anggaran mencapai Rp. 8.838.933.736,- atau 94,46% dan realisasi fisik 100%. Adapun rincian anggaran dan realisasi fisik dan keuangan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2022

No.	Nama Program/Kegiatan	PAGU	Realisasi Keuangan		Fisik
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
	Belanja Operasi Tahun 2022	9.357.175.562	8.838.933.736	94,46	100
	Belanja Pegawai	2.192.297.740	1.791.538.755	81,72	100
	Belanja Barang dan jasa	6.541.735.862	6.478.129.675	99,03	100
	Belanja Modal	623.141.960	569.265.306	91,35	100
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	273.356.040	272.938.765	99,85	100
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	349.785.920	296.326.541	84,72	100
I.	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.404.292.740	2.000.965.475	93,35	100
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan lainnya	2.161.937.740	1.761.178.755	81,46	100
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	210.360.000	207.860.000	98,81	100
3.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	31.995.000	31.926.720	99,79	100
II.	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.548.000	27.425.000	99,55	100
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	16.500.000	16.500.000	100,00	100
2.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	11.048.000	10.925.000	98,89	100
III.	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.602.873	311.917.113	97,90	100
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.708.500	10.661.500	99,56	100
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6.993.800	5.944.880	85,00	100

3.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.887.500	2.580.000	89,35	100
4.	Fasilitasi kunjungan tamu	8.400.000	8.160.000	97,14	100
5.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	235.044.000	228.595.022	99,63	100
IV.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	279.131.040	278.713.765	99,74	100
1.	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	206.000.000	205.950.825	99,98	100
2.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	73.131.040	72.762.940	99,50	100
V.	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.000.000	12.000.000	100,00	100
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	100,00	100
VI.	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	253.453.724	224.792.945	88,69	100
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	499.959.956	438.804.671	87,77	100
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.024.036	105.328.130	88,59	100
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.150.000	7.150.000	100,00	100
VII.	Program Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	261.821.400	255.185.050	97,47	100
1.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	261.820.400	255.185.050	97,47	100
VIII.	Program Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	765.190.500	758.061.600	99,07	100,00
1.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	765.190.500	758.061.600	99,07	100,00
VII.	Program Pembangunan Prasarana Pertanian	4.730.971.986	4.705.424.648	99,46	100
1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.730.971.986	4.705.424.648	99,46	100
VIII.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	112.227.500	106.037.125	94,48	100
1.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	112.227.500	106.037.125	94,48	100
	Jumlah Total	9.357.175.922	8.838.558.736	94,46	100

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2022 didasarkan pada Renstra Dinas Perkebunan tahun 2017-2022, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berikut evaluasi kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan TA. 2022

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Program dan Kegiatan			
		Indikator	Target	Realisasi	(%)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administraasi Perkantoran	85%	85%	100
I.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	100
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan lainnya	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	100
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honor KPA, PPTK, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran	12 bulan	12 bulan	100
3.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
II.	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	80%	100%	100
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	22 pasang	22 pasang	100
2.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 orang	3 orang	150
III.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	100
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	44 unit	44 unit	100
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	70 unit	265 unit	378,57
3.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	528 eksemplar	500 eksemplar	94,70
4.	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	240 orang	240 orang	100

5.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	52 kali	52 kali	100
III.	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	100
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100
IV.	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	10 unit	22 unit	220
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara	10 unit	7 unit	70
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	14 unit	14 unit	100
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung kantor	1 unit	1 unit	100
V.	Program Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah produksi hasil perkebunan	43.164 Ton	37.273,31 ton	86,35
1.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	3 laporan	4 laporan	133,33
VI.	Program Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah produksi hasil perkebunan	43.164 Ton	37.273,31 ton	86,35
1.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pemanfaatan SDG Hewan/tanaman	10.000 anakan	30.196 anakan	301,96
VII.	Program Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Panjang jalan produksi perkebunan	10 unit	27 unit	270
1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	10 unit	27 unit	270
VIII.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah luas serangan yang tertangani	50 Ha	50 Ha	100
1.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	50 Ha	50 Ha	100

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bolang Mongondow berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya;
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bolang Mongondow berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah;
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolang Mongondow:

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Kerjasama dengan pihak stakeholders, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat

Rencana Kinerja Tahun 2024

Tabel 2.3. T – C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan dan Pencapaian Renstra Dinas Perkebunan s/d Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2023	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja renja tahun 2022	Realisasi Kinerja renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
02.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Percentase Peningkatan Tata Kelola Kesekretariatan (%)	85	85			100	100%	-	-
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan (bulan)	12	12	12	12	100	12	-	-
01.1.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	14	14	14	14	100	14	-	-
01.1.02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	waktu pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)	12	12	12	12	100	12	-	-
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD (dokumen)	-	-	1	1	100	1		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah (bulan)	--	-	12	12	100	12		
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (pasang)	-	-	22	22	100	19		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	JUmlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	-	-	2	3	150	4		

Rencana Kinerja Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2023	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja renja tahun 2022	Realisasi Kinerja renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	12	12	12	12	100	12	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis alat tulis kantor (Jumlah/Jenis)	17	17	-	-	100	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Lembar)	10.400	10.400	-	-	100	-	-	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (unit)	-	-	44	44	100	-		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (buah)	-	-	70	265	378,57	40		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Eksemplar)	528	528	528	500	100	-		-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang yang disediakan Makan Minum (kali)	240	240	240	240	100	240	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan (Laporan)	50	50	52	52	100	50	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (persen)	-	-	75	75	100	80		

Rencana Kinerja Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2023	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja renja tahun 2022	Realisasi Kinerja renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan (unit)	-	-	1	1	100	-		
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	-	-	5	5	100	10		
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	12	12	12	12	100	12	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	12	12	12	100	12	-	-
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (%)	100	100	75	75	100	75	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	10	10	10	100	10	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	18	14	14	100	20	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	1	100	1	-	-
	PERTANIAN									

Rencana Kinerja Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2023	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja renja tahun 2022	Realisasi Kinerja renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi hasil Perkebunan (Ton)	43.164	37.296,83	43.164	37.296,83	86,41			
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (kelompok tani)	3	10	3	4	133,33	1 laporan		
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (kelompok tani)	3	10	3	4	133,33	1 laporan		
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000	52.300	10.000	30.196	301,96	2 dokumen		
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tumbuhan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tumbuhan (anakan)	40.000	52.300	10.000	30.196	301,96	10.000		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi hasil Perkebunan (Ton)	43.164	37.296,83	43.164	37.273,31	86,35			
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Panjang Jalan Produksi Perkebunan	5.000	6.937	5.000	6.937	138.74	10 unit		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (meter)	5.000	6.937	5.000	6.937	138.74	10 unit		
3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANAN PERTANIAN	Jumlah Produksi hasil Perkebunan (Ton)	43.164	37.296,83	43.164	37.296,83	86,41	50 Hektar		

Rencana Kinerja Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2023	Perkiraan realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2022	
					Target Kinerja renja tahun 2022	Realisasi Kinerja renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana pertanian Kabupaten/Kota	Adanya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (bulan)	12	12	12	12	100	50 Hektar		
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jenis obat-obatan Pengendali Hama Perkebunan (jenis)	3	3	3	3	100	50 Hektar		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis kinerja pelayanan PD menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renja Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit diukur sehingga untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator-indikator yang lebih dapat diukur. Oleh karena itu, Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan indikator kinerja periode 2023-2026 sebagai tolok ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan memberi gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diemban.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow s/d Tahun 2022 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4. Tabel T-30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1.	Jumlah Produksi Perkebunan yang dipasarkan	-	-	50.000 Ton	-	-	-	37.273,31 ton		-	-	
2.	Jumlah produksi hasil perkebunan komoditi kemiri	-	-	550 ton	-	-	-	469,17 ton		-	-	
3.	Jumlah Produksi hasil perkebunan Komoditi Kelapa ()	-	-	34.000 ton	-	-	-	29.993,61 ton		-	-	
4.	Jumlah Produksi hasil perkebunan Komoditi Cengkeh ()	-	-	1.600 ton	-	-	-	0,01 ton		-	-	
5.	Jumlah Produksi hasil perkebunan Komoditi Kakao ()	-	-	5.000 ton	-	-	-	3.788,00 ton		-	-	
6.	Jumlah Produksi hasil perkebunan Komoditi Kopi ()	-	-	4.000 ton	-	-	-	2.972,83 ton		-	-	
7.	Jumlah Produksi hasil perkebunan Komoditi Pala ()	-	-	40 ton	-	-	-	42,04 ton		-	-	
8.	Cakupan petani pekebun yang menggunakan teknologi perkebunan	-	-	30 poktan	-	-	-	13 Poktan		-	-	
9.	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	-	-	-	63 angka	70 angka	73 angka	-	-	70 angka	73 angka	
10.	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (6 komoditi)	-	-	-	-9.00%	-5.50%	-2.00%	-	-	-2.00%	-2.00%	

Berdasarkan tabel diatas, ada perubahan indikator dalam pencapaian kinerja pada tahun 2023-2024. Hal ini sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 yakni dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Dalam aturan tersebut disampaikan bahwa undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota melalui pemilihan serentak Nasional pada tahun 2024.

Sehingga Adanya aturan ini menggambarkan bahwa daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir. Disatu sisi penyusunan RKPD Tahun 2024 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD. Sehingga disusunlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menilai tingkat kinerja pelayanan Dinas Perkebunan, dengan indikator kinerja utama Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB Pertanian (%) dengan target 8,0 realisasi 32,17% Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB yang dirilis oleh BPS Kabupaten Bolaang Mongondow hanya sampai dengan tahun 2020. Untuk tahun 2021 s/d tahun 2022 tidak ada data spesifik mengenai kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Sektor Pertanian, sehingga hasil capaian kinerja terhadap sasaran tahun 2020 s/d Tahun 2022 menggunakan data terakhir yang dirilis oleh BPS pada tahun 2020.

Realisasi capaian kinerja terhadap Renstra dihitung berdasarkan rata-rata kontribusi sub sektor perkebunan tahun 2017 s/d 2022 sebesar 30,51%. Untuk Capaian indikator kinerja terhadap Renstra melebihi target yang ditetapkan, capaian kinerja tersebut jika kita nilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori "SANGAT BERHASIL".

Realisasi kinerja tahun 2022 terhadap standar Nasional. Capaian produksi perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5. Produksi Perkebunan Tahun 2020 dan tahun 2021 (ribu ton)

Tahun	Kabupaten	Provinsi	Nasional
2021	36.72	279.7	4.341,1
2022	36.73	280.0	4.334.4

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa produksi perkebunan di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2022 sebesar 36,73 ribu ton mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah produksi perkebunan pada tahun 2021 sebesar 36,72 ribu ton. Sedangkan untuk tingkat provinsi mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan jumlah produksi 280 ribu ton dibandingkan dengan jumlah produksi pada tahun 2021 sebesar 279,7 ton. Produksi perkebunan untuk tingkat nasional pada tahun 2022 sebesar 4.334,4 ribu ton mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi perkebunan pada tahun 2021 sebesar 4.341,1 ribu ton.

2.3.2 Identifikasi permasalahan/hambatan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

Meskipun secara umum capaian kinerja sasaran ialah **Sangat Berhasil**, akan tetapi secara indikator sasaran khususnya pada indikator Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan indikator Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan belum bisa memenuhi target. Hal ini terjadi disebabkan oleh :

1. Kemampuan dana APBD yang dialokasikan masih sangat terbatas untuk penyediaan teknologi berupa bantuan peralatan dan mesin pertanian untuk kelompok tani perkebunan.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Dinas Perkebunan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis dan pendampingan petani/kelompok tani di lapangan.

2.3.3 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan

Pengembangan pelayanan dinas perkebunan menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang harus diidentifikasi dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini beberapa tantangan dan peluang tersebut:

Tantangan

1. Perubahan iklim dapat mempengaruhi siklus tanam dan hasil panen
2. Pengendalian hama dan penyakit dapat berubah distribusinya
3. Lahan perkebunan yang semakin terbatas karena alih fungsi lahan untuk kebutuhan yang lain
4. Rendahnya adopsi teknologi oleh petani karena faktor biaya atau kurangnya pengetahuan
5. Fluktuasi harga komoditas perkebunan yang seringkali merugikan petani kecil
6. Kapabilitas sumber daya manusia yang terbatas

Peluang

1. Penggunaan aplikasi dan platform digital untuk menajemen lahan dan pemasaran hasil perkebunan
2. Mengembangkan berbagai jenis tanaman perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi dan tahan terhadap perubahan iklim
3. Produk olahan hasil perkebunan dapat meningkatkan nilai tambah
4. Program kemitraan dengan Perusahaan untuk penyerapan hasil panen dan transfer teknologi
5. Kebijakan Pemerintah yang mendukung pengembangan sektor perkebunan
6. Program subsidi dan bantuan sarana prasarana bagi petani perkebunan untuk meningkatkan produktivitas

Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, Dinas Perkebunan dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.4 Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

Pembangunan perkebunan tidak terlepas dari pengaruh isu-isu strategis yang ada, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Pada lingkungan regional yang dominan mempengaruhi perubahan pembangunan perkebunan meliputi degradasi kualitas

sumber daya alam, pengembangan teknologi perkebunan dan permintaan terhadap pupuk organik.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.6 Identifikasi isu-isu strategis

NO	ISU LOKAL	ISU NASIONAL
1	<ul style="list-style-type: none"> - Bolaang Mongondow merupakan daerah yang memiliki potensi pengembangan sub sektor perkebunan yang cukup tinggi namun pelaksanaan pembangunan perkebunan di kabupaten Bolaang Mongondow belum terlaksana secara maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan bahan baku industry perkebunan semakin hari semakin meningkat sehingga membutuhkan dukungan suplay bahan baku dari daerah-daerah yang memiliki potensi perkebunan yang cukup tinggi.
2	<ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan Dinas Perkebunan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Sebagai Satu-Satunya Perangkat Daerah Mandiri Di Antara Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Utara Memberikan Peluang Dan Harapan Baru Dalam Pembangunan Perkebunan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Kedepan - Sarana Dan Prasarana Untuk Akses Perdangan Produksi Hasil Perkebunan Mulai Terbuka Di Kabupaten Bolaang Mongondow Baik Melalui Jalur Laut, Sehingga Memberikan Peluang Untuk Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan Kab. Bolaang Mongondow ke luar daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saat ini pemerintah pusat sedang melaksanakan program komoditi unggulan daerah dan kabupaten Bolaang Mongondow di tetapkan menjadi daerah dengan komoditi unggulan Kakao, Kelapa dan Cengkeh hal ini dapat menjadi prospek jangka panjang terhadap pembangunan usaha perkebunan khususnya keberadaan Industri-Industri Perkebunan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratik dan partisipatif.

Hasil analisis kebutuhan menunjukkan terdapat beberapa perubahan terhadap program dan kegiatan Dinas Perkebunan karena disesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan serta kebutuhan untuk rencana kerja tahun 2024

Dari tinjauan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah yang menyangkut indikator target kinerja, target capaian, pagu indikatif, dan kebutuhan dana yang harus disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 – 2026. Review rancangan awal RKPD Tahun 2024 pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.7. Tabel T-C31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks pelayanan publik organisasi perangkat daerah	75 angka	3.115.199.179	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks pelayanan publik organisasi perangkat daerah	75 angka	3.115.199.179
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan SDN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	90%	2.395.201.924	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan SDN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	90%	2.395.201.924
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 orang/bulan	2.138.850.528	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 orang/bulan	2.138.850.528
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	193.360.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	193.360.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12 laporan	62.991.396	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12 laporan	62.991.396
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 dokumen	49.974.900	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 dokumen	49.974.900
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	20 paket	19.980.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	20 paket	19.980.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	11.048.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	11.048.000

Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	325.227.506	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	325.227.506
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	10.674.186	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	10.674.186
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	13.678.320	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	13.678.320
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 laporan	300.875.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 laporan	300.875.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Percentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	9 unit	109.925.742	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Percentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	9 unit	109.925.742
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	109.925.742	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	109.925.742
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12.300.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12.300.000
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12.300.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12.300.000
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	49 unit	222.569.107	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	49 unit	222.569.107
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	213.134.107	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	213.134.107
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	9.435.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	9.435.000
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 Unit	35.684.100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 Unit	35.684.100

Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	-5,5%	1.836.337.338	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	-5,5%	1.836.337.338
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	586.707.838	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	586.707.838
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	586.707.838	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	586.707.838
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme	2 Dokumen	1.249.629.500	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme	2 Dokumen	1.249.629.500
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	10000 anakan	1.249.629.500	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	10000 anakan	1.249.629.500
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	-5,5%	3.648.568.338	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	-5,5%	3.648.568.338
	Pembangunan Prasarana Pertanian		Panjang Jalan Produksi Perkebunan yang Terbangun	10 unit	3.648.568.338	Pembangunan Prasarana Pertanian		Panjang Jalan Produksi Perkebunan yang Terbangun	10 unit	3.648.568.338
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 unit	3.648.568.338	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 unit	3.648.568.338
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	0,52 %	262.515.916	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	0,52 %	262.515.916
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah luas serangan yang tertangani	50 Ha	262.515.916	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah luas serangan yang tertangani	50 Ha	262.515.916
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	262.515.916	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	262.515.916

Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian	0.03 angka	115.999.916	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian	0.03 angka	115.999.916
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kegiatan Penyuluhan	3 Kecamatan	115.999.916	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kegiatan Penyuluhan	3 Kecamatan	115.999.916
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan	2 unit	115.999.916	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan	2 unit	115.999.916

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi baik dari hasil penelaahan prioritas pembangunan daerah, dan isu-isu strategis (teknokratis), yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pokok-pokok pikiran Anggota DPRD. Berdasarkan musrenbang (partisipatif) tidak ada usulan yang ditujukan kepada Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan Penting	Ket.
2	Pilihan					
2	Pertanian					
I.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah hasil produksi perkebunan	39.000 Ton		
1.	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	15 Kecamatan	Jumlah kelompok tani perkebunan penerima sarana pendukung pertanian	36 Usulan	Kegiatan Prioritas hasil Muserenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2023	
2.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tumbuhan	15 Kecamatan	Jumlah bibit unggul tanaman perkebunan	57 Usulan	Kegiatan Prioritas hasil Muserenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2023	
II.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	39.000 ton		
3.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	15 Kecamatan	Panjang jalan produksi perkebunan	37 Usulan	Kegiatan Prioritas hasil Muserenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2023	
III.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	39.000 ton		
4.	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	15 Kecamatan	Jenis bahan kimia dan obat-obatan pengendali organisme pengganggu tanaman perkebunan	1 Usulan	Kegiatan Prioritas hasil Muserenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2023	
VI.	Program Penyuluhan Pertanian	.	Terselenggaranya penyuluhan pertanian	3 kec.		
5.	Pengembangan Kapasitas Kelmbagaan Petani di Kecamatan dan Desa	3 Kecamatan	Terlaksananya pembinaan pada kelompok tani	150 orang	Kegiatan Prioritas SKPD	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pencapaian Visi **“TERWUJUDNYA INDONESIA BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Perkebunan memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2024: MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	
Prioritas Nasional	
PRIORITAS 1	Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim
PRIORITAS 2	Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
PRIORITAS 3	Pelaksanaan PEMILU 2024
PRIORITAS 4	Revitaliasi industry dan penguatan riset terapan
PRIORITAS 5	Penguatan daya saing usaha
PRIORITAS 6	Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
PRIORITAS 7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan konektivitas
PRIORITAS 8	Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Adapun kebijakan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Tema Pembangunan dan Prioritas Daerah Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023: "Revitalisasi daya saing melalui penguatan infrastruktur dan sumberdaya manusia serta kualitas lingkungan hidup".	
Prioritas Daerah	
PRIORITAS 1	Penguatan daya dukung pelayana publik yang prima
PRIORITAS 2	Peningkatan kualitas Pendidikan
PRIORITAS 3	Peningkatan kualitas tata Kelola Pemerintahan
PRIORITAS 4	Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN
PRIORITAS 5	Stabilitas daerah yang terjamin dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak
PRIORITAS 6	Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan
PRIORITAS 7	Pemetaan potensi investasi dan promosi
PRIORITAS 8	Penguatan koperasi, UMKM dan industri pengolahan
PRIORITAS 9	Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city
PRIORITAS 10	Pemerataan Pembangunan

Memperhatikan arah kebijakan nasional dan daerah tahun 2024, Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow mendukung secara tidak langsung prioritas Pembangunan nasional dan provinsi sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan yaitu menyelenggarakan urusan dibidang Perkebunan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sehingga dukungan Dinas Perkebunan dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan daerah tahun 2024 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah, yang berkaitan dengan pengelolaan perkebunan di daerah melalui indikator kinerja utama dinas perkebunan dalam mendorong sektor pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan serta upaya mendorong Ketersediaan dan distribusi pangan. Semua itu dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan pemerintah bidang pertanian, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow yang awalnya adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan, berubah nama menjadi Dinas Perkebunan sesuai Surat Penetapan OPD Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016, yang mulai berlaku tahun 2017. Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Untuk mencapai visi daerah, maka Tujuan Pembangunan Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow erat kaitannya dengan misi nomor 3 yaitu Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri bertumpu pada Potensi Sumberdaya Lokal dengan tujuan Pembangunan Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Rencana Stategis Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Aparatur	Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Kontribusi Hasil Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Produksi Tanaman	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (6 Komoditi)

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 5 (lima) program utama yang kemudian dijabarkan kedalam 11 (sebelas) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang pembbiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Tertib dan Akuntabel, kegiatan-kegiatannya meliputi :
- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - b. Fasilitasi kunjungan tamu
 - c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indikator Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan, dengan kegiatan :
- 1) Pengawasan penggunaan sarana pertanian, sub kegiatan pendampingan, penggunaan sarana pendukung pertanian

- 2) Pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota, sub Kegiatan Pemanfaan SDG Hewan/Tumbuhan
- C. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indikator Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan, dengan kegiatan :
 - 1) Pembangunan prasarana pertanian, sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani.
- D. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan indikator Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- E. Program Penyuluhan Pertanian dengan indikator terselenggaranya penyuluhan pertanian, dengan kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, sub kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa.

Adapun Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Rencana Kinerja Tahun 2024

**Tabel 3.4 T-C. 33. Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								6.583.131.618				8.556.384.756	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.684.332.640				2.656.384.756	
3	27	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.080.622.122				2.077.591.016	
3	27	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		80,83 %	14 bulan	12 bulan	1.834.812.495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80,83 %	1.835.236.016
3	27	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		80,83 %	12 bulan	12 bulan	207.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80,83 %	210.360.000
3	27	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		80,83 %	1 Dokumen	12 bulan	38.449.627	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80,83 %	31.995.000
3	27	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								27.548.000				36.048.000	
3	27	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappannya	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	Presentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu		80,83 %	22 stel	80 %	16.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80,83 %	25.000.000
3	27	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Presentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu		80,83 %	4 Orang	80 %	11.048.000	Penerimaan Pembiayaan		Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80,83 %	11.048.000
3	27	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								272.367.335				241.993.800	

Rencana Kinerja Tahun 2024

3	27	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Periengkapan Kantor	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80,83 %	40 unit	12 bulan	9.025.335	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80,83 %	6.993.800
3	27	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80,83 %	240 orang	12 bulan	8.788.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80,83 %	8.400.000
3	27	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80,83 %	50 Laporan	12 bulan	254.554.000	Penerimaan Pembiayaan		Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80,83 %	213.004.000
3	27	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									89.209.590				53.682.640
3	27	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		80,83 %	8 Unit	80 %	89.209.590	Penerimaan Pembiayaan		Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80,83 %	53.682.640
3	27	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									9.840.000				24.000.000
3	27	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80,83 %	12 bulan	80 %	9.840.000	Penerimaan Pembiayaan		Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80,83 %	24.000.000
3	27	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									204.745.593				223.069.300
3	27	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara	Percentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara		80,83 %	10 unit	75 %	159.626.493	Penerimaan Pembiayaan		Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80,83 %	108.769.300
3	27	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	Percentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara		80,83 %	20 Unit	75 %	9.435.000	Penerimaan Pembiayaan		Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80,83 %	14.300.000
3	27	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Percentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara		80,83 %	1 Unit	75 %	35.684.100	Penerimaan Pembiayaan		Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80,83 %	100.000.000

Rencana Kinerja Tahun 2024

3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								1.198.978.500					1.650.000.000
3	27	02	2,01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								569.944.500					900.000.000
3	27	02	2,01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		-9,00 %	1 Laporan	1 Laporan	569.944.500	Penerimaan Pembiayaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	-9,00 %	900.000.000
3	27	02	2,02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								629.034.000					750.000.000
3	27	02	2,02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme		-9,00 %	10000 anak	2 Dokumen	629.034.000	Penerimaan Pembiayaan		Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	-9,00 %	750.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								2.366.642.520					3.500.000.000
3	27	03	2,02		Pembangunan Prasarana Pertanian								2.366.642.520					3.500.000.000
3	27	03	2,02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Panjang Jalan Produksi Perkebunan yang Terbangun		-9,00 %	10 Unit	10 unit	2.366.642.520	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	-9,00 %	3.500.000.000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								112.774.500					300.000.000
3	27	05	2,01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								112.774.500					300.000.000
3	27	05	2,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah luas serangan yang tertangani		0,41 %	50 Ha	50 Ha	112.774.500	Penerimaan Pembiayaan		Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	0,41 %	300.000.000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								220.403.458					450.000.000
3	27	07	2,01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								220.403.458					450.000.000
3	27	07	2,01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan	Jumlah Kegiatan Penyuluhan		0,03 angka	3 Kelompok Tani	3 Kecamatan	220.403.458	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian	0,03 angka	450.000.000
TOTAL													6.583.131.618					8.556.384.756

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2023 – 2026, Rencana Strategis tahun 2023 - 2026 dan RKPD tahun 2024, maka untuk mencapai target kinerja dijabarkan secara sistematis melalui perumusan program dan kegiatan pada perangkat daerah.

Program dan kegiatan masing-masing urusan berdasarkan perangkat daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :

- A. Program yang dilaksanakan setiap Perangkat Daerah yaitu
 - 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- B. Urusan Pilihan Pertanian
 - 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - 4. Program Penyuluhan Pertanian

Pendanaan program yang dijabarkan dalam uraian kegiatan atau pagu indikatif, merupakan batasan anggaran yang diberikan pada masing-masing program dan kegiatan. Untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jumlah pendanaan program dan kegiatan ditentukan berdasarkan kebutuhan serta efisiensi anggaran dan tepat sasaran. Pendanaan program dan kegiatan disajikan pada tabel berikut :

Rencana Kinerja Tahun 2024

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023																
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana											
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan													
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													6.583.131.618							
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													2.684.332.640							
3	27	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													2.080.622.122							
3	27	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		80,83 %	14 bulan	12 bulan	1.834.812.495	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
3	27	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		80,83 %	12 bulan	12 bulan	207.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
3	27	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		80,83 %	1 Dokumen	12 bulan	38.449.627	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
3	27	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													27.548.000							
3	27	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu		80,83 %	22 stel	80 %	16.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										

Rencana Kinerja Tahun 2024

3	27	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaiannya Tepat Waktu		80,83 %	4 Orang	80 %	11.048.000	Penerimaan Pembiayaan
3	27	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
3	27	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80,83 %	40 unit	12 bulan	9.025.335	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80,83 %	240 orang	12 bulan	8.788.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		80,83 %	50 Laporan	12 bulan	254.554.000	Penerimaan Pembiayaan
3	27	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
3	27	01	2,07	06	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		80,83 %	8 Unit	80 %	89.209.590	Penerimaan Pembiayaan
3	27	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	27	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80,83 %	12 bulan	80 %	9.840.000	Penerimaan Pembiayaan
3	27	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	27	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara		80,83 %	10 unit	75 %	159.626.493	Penerimaan Pembiayaan

Rencana Kinerja Tahun 2024

3	27	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan dukungan administrasi kkesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara		80,83 %	20 Unit	75 %	9.435.000	Penerimaan Pembiayaan
3	27	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase layanan dukungan administrasi kkesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara		80,83 %	1 Unit	75 %	35.684.100	Penerimaan Pembiayaan
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								1.198.978.500	
3	27	02	2,01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								569.944.500	
3	27	02	2,01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		-9,00 %	1 Laporan	1 Laporan	569.944.500	Penerimaan Pembiayaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
3	27	02	2,02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								629.034.000	
3	27	02	2,02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme		-9,00 %	10000 anak	2 Dokumen	629.034.000	Penerimaan Pembiayaan
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								2.366.642.520	
3	27	03	2,02		Pembangunan Prasarana Pertanian								2.366.642.520	
3	27	03	2,02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Panjang Jalan Produksi Perkebunan yang Terbangun		-9,00 %	10 Unit	10 unit	2.366.642.520	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								112.774.500	
3	27	05	2,01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								112.774.500	
3	27	05	2,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah luas serangan yang tertangani		0,41 %	50 Ha	50 Ha	112.774.500	Penerimaan Pembiayaan

Rencana Kinerja Tahun 2024

3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					220.403.458		
3	27	07	2,01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					220.403.458		
3	27	07	2,01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan	Jumlah Kegiatan Penyuluhan		0.03 angka	3 Kelompok Tani	3 Kecamatan

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 adalah perencanaan teknis operasional tahunan Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan implikasi kebijakan pembangunan nasional (RPJP Nasional, RPJM Nasional dan RKP Nasional), Penjabaran Kebijakan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow.

Renja ini merupakan pedoman dan arahan bagi pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2024. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dengan Renja Dinas Perkebunan Tahun 2024 serta mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun dalam urusan pertanian, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow.

Lolak, Juli 2023

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

